

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang penyelenggaraan pemerintahannya dengan menerapkan sistem desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka Pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah termasuk pembangunan ekonomi dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Lincoln Arsyad (2010)

Berdasarkan peraturan pemerintah No 17 Tahun 2010 “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

maupun masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Dalam hal tercapainya penggunaan aset daerah yang efisien dan efektif maka pemerintah membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam peraturan tersebut kegiatan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang penghapusan aset. Pertama, penelitian Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti dan Hermanto yang berjudul Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram yang menyatakan bahwa proses penghapusan BMD rusak berat pada Pemerintah Kota Mataram pelaksanaannya masih dipusatkan pada BPKAD Kota Mataram selaku leading sektor BMD. Kendala yang menjadi penghambat adalah ketidaklengkapan dokumen serta ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk dihapuskan. Kedua, penelitian Monika Sutri, Venje Ilat dan Sherly Pinatik yang berjudul Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Tomohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan siklus penghapusan serta pemindahtanganan yang merupakan tindakan yang saling berhubungan telah sesuai dalam menghapus aset tetap yang tidak lagi optimal dalam penggunaannya dari daftar barang milik daerah. Ketiga, penelitian Veronika Mulalinda dan Steven J. Tangkuman yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada DPPKAD Kabupaten Sitaro yang menyatakan bahwa pelaksanaan penghapusan barang milik daerah DPPKAD Kabupaten Sitaro sistem dan prosedurnya belum efektif, DPPKAD hanya melaksanakan tugasnya yakni melaksanakan pengusulan terhadap aset-aset daerah yang layak untuk dihapuskan.

Keempat penelitian Putri Sholiha Anggraini dan Siti Puryandani yang berjudul Implementasi Penghapusan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud Studi Kasus Pada BPPKAD Kabupaten Blora Tahun 2019 yang menyatakan sistem pengendalian internal dalam proses penghapusan aset pada BPPKAD adalah melalui mekanisme rekonsiliasi dan pengecekan secara fisik pada perangkat daerah langsung. Kelima penelitian Indah Namira, Hendrik Manosoh dan Dhulo Afandi yang menyatakan sistem dan prosedur penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah memenuhi unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah tetapi mengalami hambatan berupa diperlukannya waktu yang cukup lama dalam melaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan tidak akan terlepas dari penggunaan aset terutama aset tetap, aset tersebut harus selalu terjaga kualitasnya sehingga selalu dapat memenuhi rencana yang akan dijalankan dan dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin, untuk menjaga kondisi aset tetap agar selalu dalam keadaan baik maka perlu adanya pemeliharaan aset, pemeliharaan aset tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka apabila terdapat aset yang berlebihan sehingga memungkinkan untuk tidak digunakan maka biaya pemeliharaan dan manfaat yang di peroleh menjadi tidak sebanding, dan juga untuk aset yang tidak dimanfaatkan aset tersebut tentu saja membebani APBD, sejalan dengan permasalahan tersebut maka perlu adanya penghapusan aset tetap yang merupakan salah satu bagian pengelolaan barang milik daerah.

Aset yang mengalami rusak berat baik karena usia dari aset tersebut, ataupun rusak karena bencana alam dan sebab-sebab lain sehingga aset menjadi tidak layak pakai maka perlu untuk di lakukan penghapusan aset, jika tidak dilakukan penghapusan aset maka akan berdampak negatif terhadap penilaian laporan keuangan, aset yang mengalami kondisi tersebut jika tidak segera di hapuskan akan menjadi temuan pada saat pemeriksaan oleh BPK, penghapusan aset harus segera dilakukan guna untuk menyehatkan kembali posisi keuangan pada laporan neraca pemerintah Kabupaten Banjarnegara, BPPKAD Kabupaten Banjarnegara merupakan koordinator penghapusan aset pada

Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara hal tersebutlah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.

Dilakukannya penghapusan aset merupakan suatu bentuk menjalankan tertib administrasi barang milik daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan membuat laporan Tugas Akhir ini dengan Judul **“SISTEM PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis sangat ingin untuk mengetahui dan mengupas bagaimana Sistem Penghapusan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

## **C. Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan**

### **1. Maksud Praktek Kerja Lapangan**

- a. Untuk memahami dan mengetahui secara langsung mekanisme sistem penghapusan aset tetap pada BPPKAD Banjarnegara.
- b. Untuk melengkapi sebagai syarat kelulusan studi pada program studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

## 2. Tujuan Praktek Kerja Lapangan

- a. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu dan kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya pada dunia kerja.
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai mekanisme penghapusan aset tetap pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara.
- c. Untuk memperoleh gambaran secara nyata terkait penerapan ilmu akuntansi pemerintahan dan teori yang di terima penulis selama mengikuti perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi faktual pada prakyek yang di laksanakan di BPPKAD Banjarnegara

## 3. Manfaat Praktek Kerja Lapangan

- a. Manfaat Bagi Mahasiswa
  - 1) Sebagai bahan untuk menyusun Tugas Akhir.
  - 2) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan kemampuan dan melatih ketrampilan di bidang akuntansi pemerintah.
  - 3) Sebagai bahan untuk meningkatkan kemampuan skil praktik yang nantinya berguna pada saat kerja nanti.
  - 4) Menambah pengalaman kerja dan menambah relasi.
  - 5) Melatih bagaimana cara beradaptasi di lingkungan pekerjaan yang mempunyai berbagai macam karakter seseorang.
- b. Manfaat Bagi Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan dalam dunia kerja terutama dibidang akuntansi.
- 2) Sebagai dasar acuan dan referensi bahan evaluasi untuk meningkatkan kurikulum.
- 3) Tugas akhir dijadikan sebagai referensi dan bahan bacaan untuk menambah informasi dan pengetahuan.

c. Manfaat Bagi Instansi Praktek Kerja Lapangan

- 1) Menilai kualitas pendidikan yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang diharapkan akan memberikan masukan guna meningkatkan kemampuan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- 2) Sebagai wujud bentuk tanggung jawab instansi pemerintahan di bidang pendidikan.

**D. Pembatasan Masalah**

★ Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian lebih fokus dan terarah. Karena keterbatasan penulis, maka penelitian hanya membatasi masalah pada sistem penghapusan aset tetap pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara.

**E. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data selama penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis yang didapat dan kemudian dikumpulkan langsung dari tempat praktek kerja lapangan untuk bahan penulisan tugas akhir, beberapa metode pengumpulan data primer adalah sebagai berikut :

a. Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pemangatan secara langsung di tempat PKL, disini penulis mengamati sistem penghapusan aset tetap di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, metode ini sangat membantu dalam memperoleh data yang akan memperkuat fakta laporan.

b. Metode Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang menguasai persoalan yang bersangkutan dengan laporan tugas akhir ini, dalam hal ini pertanyaan diajukan kepada bidang yang terkait.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di kumpulkan oleh penulis yang diperoleh melalui website BPPKAD, arsip dokumen dan catatan-catatan yang terdapat di kantor BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, Buku-buku yang ada di tempat praktek kerja lapangan ataupun buku-buku yang ada di perpustakaan dan jurnal-jurnal yang mendukung dan berhubungan dengan sistem penghapusan aset tetap.

## F. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

**Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan**

| No                       | Keterangan   | Maret |   |   |   | April |   |   |   | Mei |   |   |   |
|--------------------------|--|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|
|                          |  | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 |
| <b>Tahap Persiapan</b>   |  |       |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |
| 1                        | Melakukan observasi ke lokasi PKL  | √     |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |
| 2                        | Meminta surat pengantar dari fakultas  | √     |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |
| 3                        | Konfirmasi persetujuan dari tempat PKL                                       |       |   | √ |   |       |   |   |   |     |   |   |   |
| 4                        | Mengajukan judul tugas akhir   |       |   |   |   | √     |   |   |   |     |   |   |   |
| <b>Tahap Pelaksanaan</b> |  |       |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |
| 5                        | Melaksanakan praktik kerja lapangan  |       |   |   | √ | √     | √ | √ | √ | √   |   |   |   |
| 6                        | Melakukan wawancara kepada beberapa karyawan terkait pekerjaan               |       |   |   |   |       |   | √ | √ | √   |   |   |   |
| 7                        | Melakukan observasi dan praktik kerja langsung                               |       |   |   | √ | √     | √ | √ | √ | √   |   |   |   |
| <b>Tahap Pelaporan</b>   |  |       |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |
| 8                        | Meminta beberapa dokumen untuk di analisis dan di pelajari terkait pekerjaan |       |   |   |   |       |   | √ | √ | √   |   |   |   |
| 9                        | Membuat Laporan Praktik Kerja Lapangan                                       |       |   |   |   |       | √ | √ | √ | √   | √ | √ | √ |